

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, A. Z., dan A. Hamzah, 2002, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Panitensier*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.
- Adji, Indriyanto Seno, 2009, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Kompas Penerbit Buku, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenadamedia Group, Semarang.
- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kenana, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2014, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenadamedia Group, Semarang.
- Hadjon, Phillipus M, 1994, *Merancang dan Menulis Hukum Normatif (Teori dan Filsafat)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Halim, Ridwan A, 1982, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hiraiej, Eddy O.S, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Kartasapoerta, Kein G, 1988, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.

Subekti, Prof., S.H dan Tjirosoedibio, 1973, *Kamus Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta.

Sitanggang, Dr. Djernih B. I, 2018, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

A. Artikel Jurnal

Aleng, Yohana Lince, "Waktu Tunggu Eksekusi Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.", Universitas Kristen Satya Wacana, 2017.

Anjari, Warih, "Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Jurnal Widya Yustisia, 2015.

Emong Sapardjaja, Komariah, "Permasalahan Pidana Mati di Indonesia.", Jurnal Legislasi Indonesia, Desember 2007.

Lingga, Eka Supandi, "Tinjauan HAM Terhadap Penundaan Eksekusi Hukuman Mati.", Jurnal Universitas Sumatera Utara, 2012.

Zulfa, Eva Achjani, "Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan di Indonesia).", Universitas Indonusa Esa Unggul Jakarta, 2007.

Zulfa, Eva Achjani, "Menakar Kembali Keberadaan Pidana Mati (Suatu Pergeseran Paradigma Pemidanaan Di Indonesia).", Lex Jurnalica, 2007.

B. Hasil penelitian/ Tugas Akhir

Xena Dora Thea Bening, 2016, "Kajian Terhadap Penundaan Eksekusi Mati Terpidana Narkotika Di Indonesia (Studi Kasus Mary Jane Fiesta Veloso)", Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

Ardhaditya Rangga Pradana, 2019, "Tinjauan yuridis penundaan eksekusi mati terpidana narkotika Mary Jane Fiseta Veloso", Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

Darmawan, Ristu, 2012, "Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana." Naskah Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

C. Internet

Purba, Nelvita, 2015, "Konstitusionalitas Hukuman Mati di Indonesia." <http://majalahprosekutor.com> diakses pada 20 Juni 2024.

Rizky, Jaramaya, 2022, "Republika.co : Singapura Kembali Lakukan Eksekusi Terpidana Kasus Narkoba." <https://www.republika.co.id/berita/rfeuny370/singapura-kembali-lakukaneksekusi-terpidana-kasus-narkoba>, Diakses 8 Juli 2024.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pidana Mati", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pidanamati>, diakses 29 Januari 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Mati", <https://kbbi.web.id/>, mati diakses pada tanggal 12 Juni 2023.

Kasus Hukuman Mati di Indonesia, "Database Hukuman Mati Kasus Hukuman Mati Sejak 1969", <https://hukumanmati.id/> diakses pada tanggal 25 Mei 2023.

Yenni Ratna Pratiwi, 2020, "Menanggapi Adanya Permohonan Peninjauan Kembali Dari Lawan", 2021, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12955/Menanggapi-Adanya-Permohonan-Peninjauan-Kembali-PK-Dari-Lawan.html> diakses pada tanggal 21 Mei 2023.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Mati Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer .

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 987 K/Pid.Sus/2011, tanggal 31 Mei 2011

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 385/PID.B/2010/PN.SLMN, tanggal 11 Oktober 2010